

Akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa sebagai praktik anti-korupsi

Siti Rahma

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: rahamajha@gmail.com

Kata Kunci:

Akuntabilitas, dana organisasi mahasiswa, transparansi, anti-korupsi, tata kelola organisasi.

Keywords:

Accountability, student organization funds, transparency, anti-corruption, organizational governance.

ABSTRAK

Organisasi mahasiswa dipahami sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan, tanggung jawab, dan tata kelola keuangan yang menuntut pengurus mengelola dana secara tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana organisasi mahasiswa, tata kelola, serta pendidikan anti-korupsi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa tampak melalui perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, transparansi informasi, dan pengawasan internal. Mekanisme transparansi dilakukan melalui pelaporan berkala,

keterbukaan dokumen keuangan, forum pertanggungjawaban, pemanfaatan media digital, serta keterlibatan anggota dan pembina dalam pengawasan. Akuntabilitas berperan sebagai praktik anti-korupsi karena membatasi penyalahgunaan wewenang, mempersempit ruang manipulasi dana, dan membentuk budaya kejujuran, integritas, disiplin, serta tanggung jawab dalam organisasi mahasiswa. Dengan demikian, pengelolaan dana yang akuntabel tidak hanya memperkuat kepercayaan anggota, tetapi juga menjadi media pendidikan karakter yang mendorong mahasiswa membiasakan perilaku transparan, etis, dan antikoruptif sejak berada dalam organisasi kampus secara konsisten dan terukur dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa.

ABSTRACT

Student organizations are understood as spaces for learning leadership, responsibility, and financial governance that require administrators to manage funds in an orderly, transparent, and accountable manner. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach. Data were obtained from journals, scientific articles, and academic documents relevant to accountability, transparency, student organization fund management, governance, and anti-corruption education. The results show that accountability in student organization fund management is reflected through budget planning, transaction recording, accountability report preparation, information transparency, and internal supervision. Transparency mechanisms are carried out through periodic reporting, openness of financial documents, accountability forums, the use of digital media, and the involvement of members and advisors in supervision. Accountability serves as an anti-corruption practice because it limits the abuse of authority, reduces opportunities for fund manipulation, and builds a culture of honesty, integrity, discipline, and responsibility within student organizations. Therefore, accountable fund management not only strengthens members' trust but also becomes a medium for character education that encourages students to practice transparent, ethical, and anti-corrupt behavior consistently and measurably in every student organization activity.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Organisasi mahasiswa merupakan ruang pembelajaran kepemimpinan, partisipasi, tanggung jawab, dan pengelolaan program kerja di lingkungan perguruan tinggi. Dalam naskah yang disusun, fokus kajian diarahkan pada akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa sebagai bagian dari praktik anti-korupsi, terutama melalui perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, transparansi informasi, dan pengawasan internal. Dana organisasi mahasiswa pada umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan kemahasiswaan, sehingga pengurus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola secara tertib, terbuka, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Suhardianto & Surgandhi (2016) menjelaskan bahwa organisasi mahasiswa dapat dipahami sebagai organisasi nonprofit karena memperoleh dana dari pihak tertentu dan menggunakannya untuk menjalankan program kerja, sehingga pelaporan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban organisasi.

Permasalahan akuntabilitas dana organisasi mahasiswa muncul ketika proses pengelolaan keuangan belum didukung oleh sistem administrasi yang rapi, bukti transaksi yang lengkap, dan mekanisme pelaporan yang terbuka. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan anggota, melemahkan pengawasan, serta membuka peluang penyalahgunaan dana. Azis et al (2025) menunjukkan bahwa laporan kegiatan organisasi mahasiswa memang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas laporan kegiatan. Selain itu, Christyawan & Sulistya (2021) menegaskan bahwa pengawasan dana organisasi mahasiswa perlu diperkuat karena pengelolaan dana kemahasiswaan memiliki risiko penyimpangan apabila tidak dikontrol dengan baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan karena kajian ini bertujuan menjelaskan makna, bentuk, dan mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa sebagai praktik anti-korupsi, bukan untuk menguji hubungan angka secara statistik. Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan dengan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana organisasi mahasiswa, tata kelola, dan pendidikan anti-korupsi. Pringgar & Sujatmiko (2020) menjelaskan bahwa studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pemilahan sumber, pembacaan isi, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan sesuai fokus penelitian.

Pembahasan

Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa

Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan, penerimaan, penggunaan, pencatatan, hingga pelaporan dana.

Dalam konteks organisasi mahasiswa, dana biasanya bersumber dari institusi kampus, sponsor, iuran anggota, peserta kegiatan, atau sumber lain yang sah, sehingga pengelolaannya tidak dapat dipahami sebagai urusan internal pengurus semata, tetapi sebagai amanah kelembagaan yang harus dapat dijelaskan kepada anggota, pembina, dan pihak kampus. Suhardianto & Surgandhi (2016) menjelaskan bahwa organisasi mahasiswa memiliki karakter sebagai organisasi nonprofit karena memperoleh dana dari pihak tertentu dan menggunakannya untuk menjalankan program kerja kemahasiswaan, sehingga praktik pelaporan menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban organisasi.

Bentuk akuntabilitas pertama adalah akuntabilitas perencanaan anggaran. Organisasi mahasiswa perlu menyusun rencana anggaran kegiatan secara rasional, terukur, dan sesuai kebutuhan program kerja. Perencanaan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai daftar kebutuhan biaya, tetapi juga sebagai alat pengendalian agar penggunaan dana tidak keluar dari tujuan kegiatan. Penelitian tentang dana organisasi mahasiswa menunjukkan bahwa proses penganggaran berperan penting dalam memastikan organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dana (Ponce et al., 2024).

Bentuk kedua adalah akuntabilitas pencatatan transaksi. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat secara tertib, dilengkapi tanggal transaksi, sumber atau tujuan dana, nominal, serta bukti pendukung seperti nota, kuitansi, invoice, atau bukti transfer. Pencatatan yang tidak rapi dapat menimbulkan kesulitan ketika organisasi harus menyusun laporan pertanggungjawaban atau menjelaskan penggunaan dana kepada pihak kampus. Paningrum et al (2025) menemukan bahwa salah satu persoalan dalam organisasi mahasiswa adalah kesalahan pencatatan, kesulitan menyusun laporan, serta lemahnya dokumentasi transaksi keuangan.

Bentuk ketiga adalah akuntabilitas pelaporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban perlu memuat informasi tentang realisasi anggaran, rincian pemasukan dan pengeluaran, saldo akhir, bukti transaksi, serta penjelasan apabila terdapat selisih antara anggaran dan realisasi. Azis et al (2025) menemukan bahwa sebagian besar organisasi mahasiswa memang menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk formal tanggung jawab, tetapi masih terdapat kelemahan dalam transparansi informasi keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana kegiatan.

Bentuk keempat adalah akuntabilitas pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan dana organisasi mahasiswa perlu diawasi oleh ketua organisasi, bendahara, badan pengawas, anggota, serta pembina kemahasiswaan. Pengawasan ini penting agar keputusan penggunaan dana tidak hanya bergantung pada satu pihak. Christyawan & Sulistya (2021) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dana organisasi mahasiswa belum selalu berjalan optimal, antara lain karena kendala pada tahap perencanaan dan kurangnya keterlibatan lembaga legislatif mahasiswa dalam proses pencairan serta penggunaan dana.

Dengan demikian, bentuk akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa mencakup perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, penyusunan laporan

pertanggungjawaban, transparansi informasi, serta pengawasan internal. Apabila dijalankan secara konsisten, akuntabilitas tidak hanya memperkuat tata kelola organisasi, tetapi juga menjadi praktik pendidikan anti-korupsi karena membiasakan mahasiswa pada nilai kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas. Hal ini sejalan dengan Syahputra et al (2024) yang menegaskan bahwa pendidikan anti-korupsi penting diterapkan di perguruan tinggi sebagai upaya pencegahan praktik koruptif sejak dini.

Mekanisme transparansi dana organisasi mahasiswa

Mekanisme transparansi dana organisasi mahasiswa merupakan proses keterbukaan informasi keuangan yang memungkinkan anggota, pembina, dan pihak kampus mengetahui sumber, penggunaan, serta pertanggungjawaban dana organisasi. Transparansi tidak hanya berarti laporan keuangan tersedia, tetapi juga bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, diperiksa, dan digunakan sebagai dasar pengawasan. Dalam konteks organisasi mahasiswa, transparansi menjadi penting karena dana yang dikelola umumnya berasal dari institusi kampus, iuran anggota, sponsor, donatur, atau kontribusi peserta kegiatan. Oleh karena itu, pengurus organisasi memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskan bagaimana dana tersebut direncanakan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan.

Mekanisme transparansi pertama dapat dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara berkala. Laporan ini memuat rincian pemasukan, pengeluaran, saldo, bukti transaksi, serta realisasi penggunaan dana berdasarkan program kerja. Azis et al (2025) menemukan bahwa sebagian besar organisasi mahasiswa telah menyusun laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab formal, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek keterbukaan informasi keuangan dan akuntabilitas penggunaan dana kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan laporan saja belum cukup apabila laporan tersebut tidak disampaikan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.

Mekanisme kedua adalah keterbukaan akses terhadap dokumen keuangan organisasi. Dokumen seperti proposal kegiatan, rencana anggaran biaya, nota pembelian, kuitansi, bukti transfer, dan laporan pertanggungjawaban harus disimpan dengan baik serta dapat ditinjau oleh anggota atau pihak kampus. Paningrum et al (2025) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi mahasiswa merupakan aspek krusial karena pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari mahasiswa dan pihak kampus. Penelitian tersebut juga menunjukkan perlunya peningkatan keterampilan pengurus dalam menyusun proposal dan laporan keuangan agar pengelolaan dana lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme ketiga adalah forum pertanggungjawaban terbuka. Forum ini dapat berbentuk rapat anggota, musyawarah organisasi, rapat evaluasi kegiatan, atau sidang laporan pertanggungjawaban. Melalui forum tersebut, bendahara atau panitia kegiatan menyampaikan laporan keuangan secara langsung, sementara anggota diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran. Penelitian Sianipar et al (2026) pada organisasi GMKI menunjukkan bahwa transparansi diterapkan melalui

pelaporan keuangan berkala menggunakan media digital, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui forum rapat pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh anggota.

Mekanisme keempat adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi keuangan. Organisasi mahasiswa dapat menggunakan Google Drive, spreadsheet bersama, grup komunikasi resmi, website organisasi, atau media internal kampus untuk menyampaikan ringkasan keuangan. Media digital mempermudah anggota mengakses laporan dan mengurangi risiko informasi hanya dikuasai oleh ketua atau bendahara. Sabili et al (2023) menegaskan bahwa transparansi menuntut kemudahan memperoleh informasi, penyajian informasi yang lengkap, keterbukaan, keteraturan publikasi, serta ketersediaan media untuk menyampaikan kritik dan saran.

Mekanisme kelima adalah pengawasan internal yang melibatkan lebih dari satu pihak. Transparansi akan lebih kuat apabila pengelolaan dana tidak hanya dikendalikan oleh bendahara, tetapi juga diawasi oleh ketua organisasi, badan pengawas, anggota, dan pembina kemahasiswaan. Christyawan & Sulistya (2021) menemukan bahwa pengawasan dana organisasi mahasiswa belum selalu berjalan optimal karena adanya kendala pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, termasuk belum maksimalnya keterlibatan lembaga legislatif mahasiswa dalam pencairan serta penggunaan dana.

Akuntabilitas sebagai praktik anti-korupsi

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana organisasi mahasiswa dapat dipahami sebagai praktik anti-korupsi karena menempatkan setiap penggunaan dana dalam mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terbuka, dan dapat diperiksa. Dana organisasi mahasiswa bukan sekadar sumber pembiayaan kegiatan, melainkan amanah kolektif yang harus digunakan sesuai tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap pengurus, terutama ketua dan bendahara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan, pengeluaran, dan sisa dana tercatat secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota, pembina, dan pihak kampus.

Sebagai praktik anti-korupsi, akuntabilitas bekerja melalui pencegahan sejak tahap awal. Ketika organisasi menyusun anggaran secara terbuka, mencatat transaksi berdasarkan bukti yang sah, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan, ruang untuk penyalahgunaan dana menjadi lebih kecil. Prinsip ini sejalan dengan gagasan tata kelola yang baik, yaitu bahwa pemerintahan atau organisasi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dibangun melalui akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum (Sulistiani, 2018). Dalam konteks organisasi mahasiswa, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pembiasaan administrasi keuangan yang jujur, rasional, dan berbasis bukti.

Akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan pengurus. Dalam organisasi mahasiswa, pengurus memiliki kewenangan untuk mengelola dana kegiatan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Slamet (2014) menjelaskan bahwa dalam tata kelola perguruan tinggi, akuntabilitas berkaitan dengan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa pertanggungjawaban diberikan, bagaimana mekanisme kontrol dilakukan, dan untuk tujuan apa pertanggungjawaban tersebut dijalankan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya

menekankan kewajiban membuat laporan, tetapi juga membangun sistem pengawasan agar penggunaan wewenang tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, akuntabilitas mengandung dimensi etis. Sulistiani (2024) menegaskan bahwa konsep amanah dalam akuntansi berkaitan dengan tanggung jawab moral, kepatuhan hukum, proses keuangan, dan perilaku dalam setiap tindakan. Pandangan ini relevan dengan pengelolaan dana organisasi mahasiswa karena bendahara dan pengurus tidak cukup hanya mampu mencatat transaksi, tetapi juga harus memiliki kesadaran bahwa dana yang dikelola merupakan titipan yang wajib digunakan secara benar. Dengan demikian, akuntabilitas membentuk karakter anti-korupsi melalui nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan keuangan.

Akuntabilitas juga membantu proses evaluasi dan audit internal. Pengelolaan dana yang terdokumentasi dengan baik akan memudahkan pemeriksaan apabila terdapat dugaan penyimpangan, selisih anggaran, pengeluaran tidak wajar, atau penggunaan dana yang tidak sesuai proposal. Sutrisno (2023) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan dapat membantu mencegah praktik korupsi, mempermudah proses audit, serta memastikan lembaga berjalan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa perlu membangun kebiasaan menyimpan bukti transaksi, membuka laporan kepada anggota, dan menyediakan forum pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai.

Kesimpulan dan Saran

Akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Akuntabilitas tidak hanya terlihat dari adanya laporan pertanggungjawaban, tetapi juga dari seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari perencanaan anggaran, penerimaan dana, penggunaan dana, pencatatan transaksi, penyimpanan bukti, penyusunan laporan, hingga pengawasan internal. Organisasi mahasiswa sebagai wadah pembelajaran kepemimpinan perlu menempatkan dana organisasi sebagai amanah kolektif yang harus digunakan sesuai tujuan kegiatan dan kepentingan anggota. Tanpa akuntabilitas, dana organisasi mudah dipahami sebagai kewenangan pengurus semata, padahal dana tersebut memiliki dimensi publik karena berkaitan dengan kepercayaan anggota, dukungan kampus, dan keberlanjutan program kerja.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas pengelolaan dana organisasi mahasiswa mencakup perencanaan anggaran yang rasional, pencatatan transaksi yang tertib, laporan pertanggungjawaban yang jelas, keterbukaan informasi keuangan, serta pengawasan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Mekanisme transparansi dapat dilakukan melalui pelaporan berkala, keterbukaan dokumen keuangan, forum pertanggungjawaban, pemanfaatan media digital, serta keterlibatan anggota dan pembina dalam proses evaluasi. Dengan mekanisme tersebut, ruang penyalahgunaan dana, manipulasi laporan, dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dapat diperkecil. Oleh karena itu, akuntabilitas berfungsi sebagai praktik anti-

korupsi karena membiasakan mahasiswa pada nilai kejujuran, integritas, kedisiplinan, keterbukaan, dan tanggung jawab sejak berada dalam lingkungan organisasi kampus.

Oleh karena itu organisasi mahasiswa disarankan untuk menyusun standar sederhana dalam pengelolaan dana, seperti format rencana anggaran, buku kas, daftar bukti transaksi, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Bendahara dan panitia kegiatan perlu mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran secara rinci agar laporan keuangan mudah diperiksa. Selain itu, setiap kegiatan sebaiknya diakhiri dengan forum evaluasi keuangan yang melibatkan pengurus, anggota, dan pembina. Forum tersebut penting agar laporan tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi menjadi ruang klarifikasi, koreksi, dan pembelajaran bersama.

Pihak kampus juga disarankan memberikan pembinaan administrasi keuangan kepada organisasi mahasiswa, terutama mengenai penyusunan proposal, pencatatan transaksi, dan pelaporan dana kegiatan. Pengawasan dari pembina kemahasiswaan perlu dilakukan secara proporsional agar organisasi tetap mandiri, tetapi tidak lepas dari prinsip pertanggungjawaban. Anggota organisasi mahasiswa juga perlu berperan aktif dalam meminta laporan keuangan, memberikan kritik, dan ikut mengawasi penggunaan dana. Untuk penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan melalui penelitian lapangan agar ditemukan gambaran empiris mengenai praktik akuntabilitas dana organisasi mahasiswa pada berbagai jenis organisasi kampus.

Daftar Pustaka

- Azis, I., Selviani, A., & Suryani, M. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Kegiatan Organisasi Mahasiswa: Studi Kualitatif. *Al Dzahab*, 6(2), 216–226. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-dzahab/article/view/5813/1698>
- Christyawan, A. F., & Sulistya, N. A. H. (2021). Pengawasan Dana Organisasi Mahasiswa: Sebuah Realitas Akademik. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 65–81. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.195>
- Paningrum, D., Kartinawati, E., Anwariningsih, S. H., & Cahaya, M. (2025). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ormawa usahid surakarta melalui penyusunan proposal dan laporan keuangan. *Syntax Idea*, 7(03), 439–447. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/12692-Article Text-21951-1-10-20250328.pdf>
- Ponce, L. B., Battad, M. C., Sabalo, R. V., & Saguiyod, H. M. (2024). Student Organization Funds at A University: Utilization of Descriptive-Correlational Analysis to Determine Factors in Budgeting. *CopyrightHolder:ThisArticleIsLicensedUnder:©Ponce et Al.(2024)Corresponding Author's Email:Ponceliezle.B@gmail.Com.ComInclusive Society and Sustainability Studies*, 4(1), 27–31.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa. *Jurnal IT-EDU*, 5(1), 317–329.
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid: Studi kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Sianipar, D., Kaban, D., Sihite, E., Paskah, P., & Sipahutar, P. (2026). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Gerakan Mahasiswa

- Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Komisariat FIS UNIMED dalam Perspektif Agama Kristen. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 3(4), 67–71.
- Slamet. (2014). Implementasi good university governance pada perguruan tinggi agama negeri dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bebas korupsi. *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2(6), 52–64. <https://repository.uin-malang.ac.id/263/>
- Suhardianto, N., & Surgandhi, H. (2016). Akuntabilitas Organisasi Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 177–191. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i3.56>
- Sulistiani, D. (2018). Good government governance menuju pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/4480/>
- Sulistiani, D. (2024). The concept of amanah metaphor in accounting: Meaning, guidelines, and purposes. *Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 286–300. <https://repository.uin-malang.ac.id/20179/>
- Sutrisno. (2023). Revitalisasi nilai-nilai Islam pada manajemen madrasah: Membangun budaya anti-korupsi dan integritas. *Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 8(1), 54–72. <https://repository.uin-malang.ac.id/15616/>
- Syahputra, Y. B., Theotama, G., & Hapsari, A. N. S. (2024). Pendidikan Anti Korupsi, Apakah Penting? *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(2), 197–210.